

## BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Mahkamah Konstitusi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum kompetensi pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah telah baik. Hal ini dapat digambarkan dari aspek-aspek yang melingkupi kompetensi pegawai, khususnya dalam penerapan teknologi informasi, ternyata memperoleh penilaian yang baik atau positif dari para responden. Namun, berdasar penelitian juga terungkap permasalahan-permasalahan yang melingkupi kompetensi pegawai dalam penerapan teknologi informasi, yaitu:

- a. Pada dimensi pengetahuan, permasalahan yang muncul adalah belum optimalnya pemahaman pegawai terhadap penggunaan teknologi informasi. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, permasalahannya adalah lebih disebabkan latar belakang pendidikan para pegawai yang terkait langsung dengan penggunaan Teknologi Informasi tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya. Dengan demikian, para pegawai kurang dapat memahami produk-produk Teknologi Informasi serta menerapkannya dalam mendukung pekerjaan-pekerjaan di lingkungan organisasi ini.
- b. Pada dimensi bakat pegawai, permasalahan yang ditemukan adalah belum optimalnya kecakapan atau daya pikir (*mindset*) para pegawai dalam menjalankan pekerjaan yang menggunakan atau menerapkan Teknologi Informasi. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, hal yang menjadi permasalahan adalah belum adanya standar kompetensi untuk semua jenis jabatan yang ada di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadi persoalan yang cukup serius dan penting untuk dicari solusinya, terutama terkait dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diemban organisasi ini. Tidak adanya standar kompetensi yang jelas terhadap setiap jabatan yang terkait langsung dengan penerapan Teknologi Informasi menjadi penyebab utama tidak sesuainya penempatan pegawai dalam jabatan

tersebut. Dengan demikian, akan sulit sekali terjadinya peningkatan ke arah perbaikan dalam upaya penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

## 6.2. Saran-saran

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian, maka perlu adanya peningkatan kompetensi pegawai, khususnya dalam penerapan teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, perlu diajukan beberapa saran, yaitu:

- a. Perlu adanya pengembangan pegawai di Mahkamah Konstitusi. Pengembangan pegawai ini secara khusus dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas atau kompetensi pegawai, yakni meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam menerapkan teknologi informasi
- b. Perlu adanya penyusunan standar kompetensi di Mahkamah Konstitusi. Penyusunan standar kompetensi pegawai akan menjadi panduan atau pedoman bagi organisasi dalam menempatkan pegawai sesuai prinsip *the right man on the right place*. Penempatan pegawai yang sesuai antara latar belakang pendidikan dan bidang pekerjaan yang dikerjakan akan mempermudah dan memperlancar dalam proses penyelesaian pekerjaan. Dengan demikian, akan terwujudnya peningkatan kinerja individu sekaligus kinerja organisasi. Untuk itu hal pokok yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan dan menerapkan standard kompetensi jabatan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi (MK) harus memperhatikan kompetensi-kompetensi yang dimiliki para pegawainya untuk memperlancar pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Mengingat kompetensi yang kurang sesuai atau tidak baik pada para pegawai akan berimplikasi pada keterlambatan atau terbengkalainya pekerjaan-pekerjaan atau rendahnya kinerja organisasi. Dengan demikian, kompetensi setiap pegawai harus terus dikembangkan sesuai dengan standar-standar yang harus melekat pada dirinya, sehingga terwujud pegawai yang profesional.